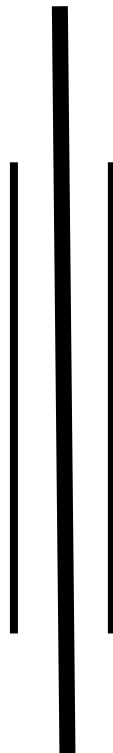


# **RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)**

**TAHUN 2025**



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN  
STATISTIK KOTA BANDA ACEH**



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA  
DAN STATISTIK**

Jl. ABU LAM U NO 7 BANDA ACEH (KOMPLEK BALAI KOTA), Telp/Fax.- KODE POS 23242

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**  
**KOTA BANDA ACEH**

**NOMOR: 065 / 24 / SK / 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH**  
**TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**  
**KOTA BANDA ACEH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut dari tujuan dan sasaran serta sebagai pedoman pelaksanaan kinerja yang akan dilaksanakan sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh periode 2023-2026, maka perlu menyusun dan menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Diskominfo Kota Banda Aceh tentang Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Diskominfo Kota Banda Aceh Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
- Undang-Undang Nomor (Drt) 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PEW/20/M.PAN/1111/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Banda Aceh 2007-2027;
14. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
15. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh;
16. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

### **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Diskominfo Kota Banda Aceh Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dokumen RKT Diskominfo Kota Banda Aceh Tahun 2025 merupakan dokumen yang menjabarkan lebih lanjut dari pelaksanaan tujuan dan sasaran serta pedoman pelaksanaan kinerja yang akan dilaksanakan sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo Kota Banda Aceh periode 2023-2026. Dokumen RKT ini menyajikan rencana pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah, serta memuat penetapan target dan anggaran yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU) Diskominfo Kota Banda Aceh Tahun 2025

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDA ACEH  
PADA TANGGAL : 17 Februari 2025

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA  
DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH**



**ALIZAR, S.Ag.,M.Hum**  
**Pembina Utama Muda /**  
**NIP. 19691117 200112 1 002**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Penghulu Alam Muhammad SAW, akhirnya dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh Tahun 2025 dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan. RKT merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Diskominfo Kota Banda Aceh pada tahun berjalan yang dilengkapi dengan penjabaran strategis dan operasional dari Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo Tahun 2023-2026 yang merupakan wujud implementasi dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026.

Penyusunan dokumen RKT Diskominfo Kota Banda Aceh Tahun 2025 ini mengacu pada dokumen Renstra Diskominfo sehingga sudah memperhitungkan perubahan dan perkembangan lingkungan strategis serta memiliki konsistensi di dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan dari Diskominfo pada bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik dan Persandian yang terarah dan terpadu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang tersedia.

Informasi yang disajikan dalam RKT Tahun 2025 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Diskominfotik Kota Banda Aceh. Dokumen RKT Tahun 2025 yang telah disusun ini semoga dapat dilaksanakan dengan baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan.

**Banda Aceh, 17 Februari 2025**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA  
DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH**



**ALIZAR, S.Ag.,M.Hum**

**Pembina Utama Muda /**

**NIP. 19691117 200112 1 002**

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I    PENDAHULUAN ..... 1

    1.1.    Gambaran Umum SKPD ..... 1

        1.1.1. Tugas Pokok ..... 1

        1.1.2. Fungsi ..... 1

    1.2.    Struktur Organisasi ..... 2

    1.3.    Tujuan Penyusunan RKT ..... 3

BAB II    PERENCANAAN STRATEGIS

    2.1.    Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Diskominfo Kota Banda Aceh..... 4

    2.2.    Strategi dan Arah Kebijakan ..... 5

BAB III    PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENETAPAN KINERJA

    3.1.    Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2025 ..... 7

    3.2.    Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2025 ..... 10

BAB IV    PENUTUP ..... 11



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Gambaran Umum SKPD**

Mengacu kepada Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh dibentuklah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan Tipe A yang mempunyai tugas di dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian. Qanun ini kemudian dituangkan dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh.

#### **1.1.1. Tugas**

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Banda Aceh.

#### **1.1.2. Fungsi**

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan wewenang Otonomi Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dengan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut di atas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh mempunyai wewenang :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika yaitu :
  - a) Melaksanakan pengelolaan informasi dan komunikasi publik, dan
  - c) Melakukan pengelolaan e-government.
2. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik melakukan penyelenggaraan statistik sektoral.
3. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian yaitu :
  - a) Melakukan penyelenggaraan persandian pengamanan informasi, dan
  - b) Melakukan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah Kota

## **1.2. Struktur Organisasi**

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh merupakan suatu lembaga Pemerintah Kota yang melaksanakan kegiatan di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik yang dibentuk berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh. Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi:
  - a) Sub Bagian Keuangan;
  - b) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
  - c) Sub Bagian Program dan Pelaporan.
3. Bidang Pengelolaan Informasi Publik, membawahi :
  - a) Seksi Pengelolaan Informasi dan Opini Publik;

- b) Seksi Penyediaan Konten dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik.
- 4. Bidang E-Government, membawahi
  - a) Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - b) Seksi Pengelolaan Aplikasi, Keamanan Informasi, Telekomunikasi dan Persandian;
- 5. Bidang Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City, membawahi :
  - a) Seksi Layanan Hubungan Media;
  - b) Seksi Penguatan Sumber Daya Komunikasi dan Ekosistem Smart City.
- 6. Bidang Statistik, membawahi :
  - a) Seksi Survei Sektoral;
  - b) Seksi Kompilasi dan Publikasi Produk Sektoral.
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional;
- 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

### **1.3. Tujuan Penyusunan RKT**

Maksud disusunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan adalah sebagai acuan bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh dalam menyusun rencana anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN STRATEGIS**

#### **2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Diskominfo Kota Banda Aceh**

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan rencana tujuan dan sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh dapat dengan tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi tanggung jawab berdasarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan adanya penetapan tujuan akan dapat diletakkan kerangka prioritas untuk menentukan arah, guna pencapaian keberhasilan sebagai motivator dan pendorong bagi kinerja yang memuaskan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Sedangkan Sasaran merupakan target yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan suatu tujuan yang jelas yang dilandasi dengan pelaksanaan tupoksi yang jelas.

##### **2.1.1. Tujuan**

Tujuan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh adalah tersedianya data dan informasi yang berkualitas dan terintegrasi dalam Kota Banda Aceh.

##### **2.1.2. Sasaran**

Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya data statistik sektoral yang berkualitas dan terintegrasi, dan
2. Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan informasi publik.

## **2.2. Strategi dan Arah Kebijakan**

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rumusan Strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bisa menciptakan nilai tambah untuk melayani *stakeholder* yang dimiliki. Strategi yang ditempuh oleh Diskominfo Kota Banda Aceh yaitu :

1. Melakukan pembinaan dan update data sektoral Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam konsolidasi forum data dan pengelolaan data sektoral;
2. Penyediaan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berkualitas;
3. Pengembangan kapasitas SDM TIK dan data sektoral;
4. Melakukan pengembangan sarana dan prasarana sistem informasi dan komunikasi, dan
5. Memperbaiki tingkat kesadaran terkait dengan isu keamanan data dan informasi.

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil dan digunakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi SKPD. Kebijakan yang akan dilakukan Diskominfo Kota Banda Aceh dalam kurun waktu 4 (empat) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengembangan SDM terkait TIK dan data sektoral serta sosialisasi;
2. Melakukan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana TIK dan informasi publik serta data sektoral;
3. Melakukan proses pengumpulan, verifikasi dan validasi data sektoral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Melakukan pemeliharaan sistem informasi dan komunikasi publik yang dimiliki;
5. Perumusan dan penetapan kebijakan, rencana induk dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, dan
6. Melakukan perbaikan tata kelola keamanan dan jaring komunikasi sandi.

**BAB III**  
**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENETAPAN**  
**KINERJA**

**3.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2025**

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Diskominfo Kota Banda Aceh dan sebagai upaya di dalam mengantisipasi berbagai permasalahan di Bidang Komunikasi, Informasi dan Statistik dan Persandian, maka disusunlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan kerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dijabarkan dalam rencana kerja setiap tahunnya dalam bentuk terukur dari Anggaran Pendapatan Belanja Kota (APBK) yang menjadi tanggung jawab Diskominfo Kota Banda Aceh yaitu :

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

**1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

**1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

**1.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD**

**1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

**1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

**1.2.2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**

- 1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 1.3.1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 1.4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - 1.4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 1.4.3. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 1.4.4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 1.5.1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 1.5.2. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
  - 1.5.3. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1.6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 1.6.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1.7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
  - 1.7.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
  - 1.7.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 1.7.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Pengelolaan Informasi & Komunikasi Publik
  - 2.1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota



- 2.1.1. Sub Kegiatan Relasi Media
- 2.1.2. Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
- 2.1.3. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
- 2.1.4. Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik
- 2.1.5. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- 2.1.6. Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Komunikasi Publik
- 2.1.7. Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik
- 3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
  - 3.1. Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    - 3.1.1. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda
    - 3.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi
    - 3.1.3. Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang Sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah
    - 3.1.4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
    - 3.1.5. Sub Kegiatan Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas Sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas
    - 3.1.6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE
    - 3.1.7. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE
- 4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
  - 4.1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
    - 4.1.1. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektor
    - 4.1.2. Sub Kegiatan Peningkatan Peran Statistik Sektor terhadap Sistem Statistik Nasional

5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

5.1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

5.1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

5.2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

5.2.1. Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

**3.2. Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2025**

Penetapan Kinerja yang merangkum Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta pendanaan yang ada di dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Diskominfo Kota Banda Aceh pada tahun 2025 dapat dilihat pada halaman lampiran.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh Tahun 2025 yang telah disusun merupakan perencanaan tahunan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan serta penetapan kinerja dan pendanaan dalam satu tahun berdasarkan penjabaran dari Renstra Diskominfo RPD Kota Banda Aceh dan sudah mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh tahun 2023-2026.

Penyusunan RKT sangat penting artinya sebagai acuan bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh dalam menyusun rencana anggaran SKPD, dan untuk memenuhi target yang telah ditetapkan demi tercapainya target kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh.

**Banda Aceh, 17 Februari 2025**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA  
DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH**



**ALIZAR, S.Ag., M.Hum**  
**Pembina Utama Muda /**  
**NIP. 19691117 200112 1 002**

RENCANA KINERJA TAHUNAN  
TAHUN 2025

Unit Kerja : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh

No	Sasaran			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan						Ket
	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Kinerja	Target	Uraian	Indikator Kinerja	Target	Uraian	Indikator Kinerja			Satuan	Target	
1				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	100%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Masukan	:	Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	-	
											Keluaran	:	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0	
											Hasil	:	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	%	100	
										Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Masukan	:	Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	-	
											Keluaran	:	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	
											Hasil	:	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	%	100	
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Masukan	:	Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	4.855.653.265	
											Keluaran	:	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	33	
											Hasil	:	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	%	100	
										Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Masukan	:	Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	2.094.810.000	
											Keluaran	:	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	
											Hasil	:	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	%	100	
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Masukan	:	Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	201.657.103	
											Keluaran	:	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	60	
											Hasil	:	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	%	100	
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Masukan	:	Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	5.861.356	
											Keluaran	:	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	
											Hasil	:	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	%	100	
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Masukan	:	Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	-	
											Keluaran	:	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	
											Hasil	:	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	%	100	
										Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Masukan	:	Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	15.495.747	
											Keluaran	:	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	7	
											Hasil	:	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	%	100	
										Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Masukan	:	Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	100.000.000	
											Keluaran	:	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	20	
											Hasil	:	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	%	100	

							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Masukan : Keluaran : Hasil :	Jumlah dana yang dibutuhkan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	(Rp) Unit %	- 3 100	
										Pengadaan Mebel	Masukan : Keluaran : Hasil :	Jumlah dana yang dibutuhkan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	(Rp) Unit %	- 13 100	
										Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Masukan : Keluaran : Hasil :	Jumlah dana yang dibutuhkan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	(Rp) Unit %	133.319.890 10 100	
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Masukan : Keluaran : Hasil :	Jumlah dana yang dibutuhkan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	(Rp) Laporan %	698.609.113 12 100	
										Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Masukan : Keluaran : Hasil :	Jumlah dana yang dibutuhkan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	(Rp) Laporan %	51.925.330 12 100	
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Masukan : Keluaran : Hasil :	Jumlah dana yang dibutuhkan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	(Rp) Unit %	90.487.100 4 100	
										Pemeliharaan Mebel	Masukan : Keluaran : Hasil :	Jumlah dana yang dibutuhkan Jumlah Mebel yang Dipelihara Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	(Rp) Unit %	- 13 100	
										Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Masukan : Keluaran : Hasil :	Jumlah dana yang dibutuhkan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	(Rp) Unit %	158.126.948 58 100	
										Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Masukan : Keluaran : Hasil :	Jumlah dana yang dibutuhkan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	(Rp) Unit %	30.000.000 1 100	
8.435.945.852															
2	Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan informasi publik	Persentase website OPD yang aktif	86%	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Terlaksananya Diseminasi Informasi kepada masyarakat	100%	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah yang disampaikan kepada masyarakat	100%	Relasi Media	Masukan : Keluaran : Hasil :	Jumlah dana yang dibutuhkan Jumlah Aktivitas Relasi Media kepada Media yang Memenuhi Kriteria Sebagai Berikut : 1. Terverifikasi Dewan Pers, dan 2. Terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. Aktif dalam Kegiatan Relasi Media Persentase website OPD yang aktif	(Rp) Laporan %	688.899.913 5 86	
										Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Masyarakat	Masukan : Keluaran : Hasil :	Jumlah dana yang dibutuhkan Jumlah Komunitas Informasi yang Aktif Mendiseminasikan Informasi dan Terdaftar di Dinas Kominfo Persentase website OPD yang aktif	(Rp) Komunitas %	30.935.900 1 86	
											Masukan :	Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	60.000.000	

									Pelayanan Informasi Publik	Keluaran	:	Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Diselesaikan Sesuai Peraturan Perundangan	Permohonan	1	
										Hasil	:	Persentase website OPD yang aktif	%	86	
									Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik	Masukan	:	Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	55.888.307	
										Keluaran	:	Jumlah Rekomendasi Komunikasi Terhadap Isu Publik yang Berkembang dan Usulan Agenda Komunikasi Prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi	1	
										Hasil	:	Persentase website OPD yang aktif	%	86	
									Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Masukan	:	Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	58.371.382	
										Keluaran	:	Jumlah Media Komunikasi Publik Milik Pemerintah Daerah yang Dikelola maupun Pemanfaat Media Berbayar Sesuai Kriteria/Juknis	Media	1	
										Hasil	:	Persentase website OPD yang aktif	%	86	
									Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Masukan	:	Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	15.000.000	
										Keluaran	:	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang Disusun	Dokumen	1	
										Hasil	:	Persentase website OPD yang aktif	%	86	
									Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Masukan	:	Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	15.000.000	
										Keluaran	:	Jumlah ASN Bidang Komunikasi Publik yang Difasilitasi Mengikuti Bimtek/Pelatihan	Orang	45	
										Hasil	:	Persentase website OPD yang aktif	%	86	
									924.095.502						
	Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	61%	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase terpenuhinya layanan Infrastruktur dan Aplikasi Informatika	100%	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase layanan e-government yang dikelola	100%	Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda	Masukan	:	Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	46.742.000	
										Keluaran	:	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda	Laporan	1	
										Hasil	:	Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	%	61	
									Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Masukan	:	Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	38.150.919	
										Keluaran	:	Jumlah Data dan Informasi yang Dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah	Dokumen	1	
										Hasil	:	Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	%	61	
									Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang Sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	Masukan	:	Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	42.987.367	
										Keluaran	:	Jumlah Aplikasi Khusus yang Dibangun dan/atau Dikembangkan Sesuai Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	Aplikasi	3	
										Hasil	:	Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	%	61	
									Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Masukan	:	Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	153.115.626	
										Keluaran	:	Jumlah Perangkat Daerah di Pemerintah Kab/Kota yang Terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Perangkat Daerah	44	
										Hasil	:	Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	%	61	
									Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas Sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Masukan	:	Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	100.000.000	
										Keluaran	:	Jumlah Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas Sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Program	1	
										Hasil	:	Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	%	61	

										Koordinasi dan Fasilitas Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Masukan	: Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	76.204.000	
											Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi Fasilitas Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Dokumen	1	
											Hasil	: Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	%	61	
										Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE	Masukan	: Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	-	
											Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE	Dokumen	1	
											Hasil	: Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	%	61	
															457.199.912
				Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	100%	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan persandian dan pengamanan informasi yang terlaksana	100%	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Masukan	: Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	7.076.730	
											Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	1	
											Hasil	: Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	%	61	
							Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jaring komunikasi sandi daerah yang dilaksanakan	100%	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Masukan	: Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	-	
											Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	44	
											Hasil	: Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	%	61	
															7.076.730
3	Tersedianya data statistik sektoral yang berkualitas dan terintegrasi	Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	31%	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase terpenuhinya database statistik sektoral daerah	100%	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota	100%	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Masukan	: Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	-	
											Keluaran	: Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang	68	
											Hasil	: Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	%	31	
										Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Masukan	: Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	100.000.000	
											Keluaran	: Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	Persentase	34	
											Hasil	: Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	%	31	
															100.000.000
															9.924.317.996
										JUMLAH					9.924.317.996

Banda Aceh, 17 Februari 2025  
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
Kota Banda Aceh



ALIZAR, S.Ag., M.Hum  
Pembina Utama Muda / 19691117 200112 1 002